

**EVALUASI PENGAWASAN PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA SEBAGAI
UPAYA UNTUK MEMINIMALISIR KREDIT BERMASALAH
(Studi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero), Tbk Cabang
Pembantu Wates Kabupaten Kediri)**

**Arum Novianita Witanti
Moch. Dzulkirom
Topowijono**
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Malang
Email: Novianita.arum@yahoo.com

ABSTRACT

This research had two objectives, that is understand the implementation of the credit provision working capital as an effort to minimize of loan defaults, and to know supervision working capital credit which should be achieved Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Capem Wates. This type of research used in this research is descriptive case study approach. The research, researchers know weakness in supervision of working capital credits not maximum causing the loan defaults better than internal factors and ekstern. Bank supposed to be improve the supervision of credit until debtor pay off credit in accordance with the command of bank, and in greater detail in an analysis credit to minimize non-performing loans can affect the level of health banks and loans provided will back so as not a loss of.

Keywords: *The Procedure of Credit Working Capital, Supervision of Credit, Non Performing Loan*

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit modal kerja sebagai upaya untuk meminimalisir kredit bermasalah, serta untuk mengetahui pengawasan kredit modal kerja yang seharusnya dilakukan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Capem Wates. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Dari hasil penelitian, peneliti mengetahui kelemahan pada pengawasan pemberian kredit modal kerja yang belum maksimal sehingga menyebabkan terjadinya kredit bermasalah baik dari faktor intern maupun ekstern. Bank seharusnya lebih meningkatkan pengawasan kredit mulai pra realisasi kredit sampai debitor melunasi kreditnya sesuai dengan ketentuan bank, serta lebih teliti dalam melakukan analisis kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan kredit yang diberikan akan kembali sehingga tidak mengalami kerugian.

Kata Kunci : *Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja, Pengawasan Kredit, Kredit Bermasalah*

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Kegiatan yang dilakukan bank dalam menghimpun dana yaitu berupa tabungan, simpanan, deposito dan bentuk lainnya. Dana yang berhasil dihimpun akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Penyaluran dana dalam bentuk kredit dapat diberikan kepada masyarakat yang telah mengajukan permohonan kredit sesuai dengan sistem dan persyaratan yang telah ditentukan oleh bank. Kredit merupakan sistem keuangan untuk semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (hasibuan,2008). Prinsip penyaluran kredit hanya atas kepercayaan dan kehati-hatian, sehingga dengan adanya kredit stabilitas usaha bank sangat dipengaruhi keberhasilannya dalam mengelola kredit. Bank yang berhasil mengelola kreditnya akan berkembang, sedangkan apabila bank mengalami kredit bermasalah akan dapat mengalami kemunduran.

Salah satu jenis kredit yang disalurkan oleh bank adalah kredit modal kerja. Bank dalam melaksanakan kegiatan pemberian kredit modal kerja senantiasa berdasarkan keyakinan bahwa nasabah mampu mengembalikan kredit yang diperolehnya pada jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian. Menurut Budisantoso dan Nuritomo "Kredit Modal Kerja adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah". Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam sesuai dengan hakekatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuai yang diinginkan terbatas. Hal ini tentunya akan menyebabkan masyarakat memerlukan bantuan untuk tambahan modal.

Menurut Firdaus (2011) dalam pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan agar kepercayaan yang menjadi unsur utama dalam pemberian kredit akan terwujud dan dapat mengena sasaran terjaminya pengembalian kredit. Penilaian kredit oleh pihak bank dapat dilakukan dengan cara penilaian analisis 5C yang meliputi *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*. Namun demikian terkadang bank juga melakukan ketidaktelitian dalam menganalisis kredit, baik itu masalah persyaratan atau kebijaksanaan yang diberikan, sehingga menimbulkan kendala yang akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya kredit

bermasalah. Kredit bermasalah merupakan bagian dari kehidupan bisnis perbankan. Bank harus menanggung resiko menghadapi kesulitan menagih kredit yang diberikan kepada debitur.

Untuk meminimalkan kendala tersebut perlu adanya pengawasan kredit. Menurut Abdullah (2005:95) "Pengawasan kredit merupakan suatu proses pemantauan pemberian kredit untuk menjaga agar apa ygmdilaksanakan dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan". Pentingnya pengawasan kredit yaitu sebagai sarana untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas aktivitas sebelum dilaksanakan suatu kegiatan yang mungkin terjadi atau meminimalkan NPL. Pengawasan kredit dilakukan secara berkesinambungan sejak permohonan kredit sampai dengan pelunasan kredit.

Salah satu bank yang memenuhi jasa masyarakat, baik pengusaha besar, menengah atau pengusaha kecil yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Capem Wates yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dituntut untuk terus berinovasi dan terus meningkatkan kepuasan nasabah dengan memberikan layanan perbankan terhadap masyarakat Jawa Timur akan kebutuhan jasa perbankan. Bank tentu memiliki kriteria dan prosedur dalam penyaluran kreditnya kepada nasabah dan harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin meminjam dana. Bank Jatim juga memiliki proses pengajuan dan pencairan kredit yang dilakukan secara cepat, hal tersebut yang akan menimbulkan kegiatan analisis kredit berlangsung kurang optimal.

Prosedur pemberian kredit yang tepat dapat menjamin sasaran kredit, ketetapan penggunaan kredit dan ketepatan dalam waktu pengembalian kredit. Sasaran kredit sangat menentukan dimana kredit yang diberikan akan dapat mendukung perkembangan usaha debitur dan kredit yang diberikan bank akan menjadi pendapatan dan keuntungan bank. Kebenaran nasabah dalam penggunaan kredit yang diberikan harus sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah diajukan ketika melakukan permohonan kredit. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi kredit bermasalah, dimana debitur mengingkari janjinya dalam penggunaan dana kredit.

Berikut adalah data kredit modal kerja yang disalurkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Capem Wates, serta data kredit bermasalah periode 31 Desember 2012 s/d 31 Desember 2015:

Tabel 1
Data Non Performing Loan Kredit Modal Kerja PT
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero)
Tbk Periode 2013-2015

Tahun	Kredit Modal Kerja		NPL
	Disalurkan	Kredit Bermasalah	
2013	54.881.928.592,91	486.145.273,12	0.89 %
2014	74.773.907.563,56	257.009.638,38	0.34 %
2015	80.894.344.138,78	808.686.917,16	0.99 %

Sumber: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Capem Wates

Pada tabel 1 merupakan data *Non Performing Loan* yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Pembantu Wates, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil perkembangan per tahunnya, disimpulkan bahwa kredit bermasalah pada tahun 2013 dan 2015 melebihi target yang telah ditentukan, sedangkan pada tahun 2014 dibawah target yang ditentukan. Penelitian ini bermaksud untuk menelusuri lebih lanjut mengenai kebijakan serta pengawasan terhadap pemberian kredit modal kerja yang diperuntukkan bagi calon debitur. Dari uraian diatas, maka penelitian ini ditulis dengan judul "**Evaluasi Pengawasan Pemberian Kredit Modal Kerja Sebagai Upaya Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah** (Studi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Pembantu Wates Kabupaten Kediri)".

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pemberian kredit modal kerja sebagai upaya untuk meminimalisir kredit bermasalah, serta mengetahui pengawasan yang seharusnya dilakukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Capem Wates sebagai upaya untuk meminimalisir kredit bermasalah.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Perbankan

Menurut Kasmir (2014:3) mengemukakan bahwa "Bank merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa bank lainnya".

2.2. Sumber Dana Bank

- Dana pihak kesatu, dana yang bersumber dari bank sendiri diperoleh dari modal sendiri (Modal setoran para pemegang saham).
- Dana pihak kedua, merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat dan merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan sebagai

ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.

- Dana pihak ketiga, dana yg diperoleh dari lembaga lainnya antara lain dari kredit likuiditas dari bank, pinjaman antar bank, pinjaman dari bank luar negeri dan dari surat berharga pasar uang. Sumber dana ini merupakan sumber dana tambahan apabila bank mengalami kesulitan (UU No.10 tahun 1998).

2.3. Pengertian Manajemen Perkreditan

Manajemen Perkreditan merupakan pengelolaan kredit yang dijalankan oleh perusahaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sedemikian rupa sehingga proses perkreditan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dengan debitur (Firdaus & Ariyanti, 2011)

2.4. Pengertian Kredit

Menurut UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998 "Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian pinjam meminjam antara dengan debitur dan diwajibkan untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu beserta bunganya".

2.5. Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang diberikan oleh perusahaan untuk membiayai modal kerja nasabah, seperti kredit modal kerja untuk membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lain yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan (Kasmir,2007)".

2.6. Prinsip Penilaian Kredit

Prinsip Pemberian Kredit dengan analisis 5C Menurut Kasmir, 2014 :

- Character*, merupakan watak atau keperibadian seseorang.
- Capacity*, Kapasitas/kemampuan nasabah dalam melunasi kreditnya.
- Capital*, melihat penggunaan modal oleh calon debitur efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan.
- Condition*, penilaian kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
- Colleteral*, jaminan yang diberikan oleh calon debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

2.7. Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2014:143) dijelaskan prosedur pemberian kredit secara umum sebagai berikut:

- a. Pengajuan berkas permohonan kredit dalam bentuk proposal, serta melampirkan dokumen yang meliputi fotocopy Akta Notaris, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), NPWP, Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir.
- b. Penyelidikan berkas pinjaman
- c. Wawancara awal
- d. On The Spot
- e. Wawancara II
- f. Keputusan Kredit
- g. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lain
- h. Realisasi Kredit
- i. Penyaluran/Penarikan dana

2.8. Pengertian Pengawasan Kredit

Salah satu fungsi manajemen dalam usaha untuk mengamankan perkreditan yang lebih baik dan efisien guna menghindari adanya penyimpangan dengan cara bank melakukan pengawasan kredit. Pengawasan Kredit merupakan fungsi manajemen untuk mengendalikan pengelolaan kekayaan perusahaan dalam bentuk perkreditan yang lebih baik, guna untuk menghindari terjadinya permasalahan dengan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan perkreditan yang telah ditentukan (Muljono, 2001:460)

2.9. Jenis Pengawasan Kredit

- a. *Preventif Control*, pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan kepada nasabah sebelum kredit disalurkan..
- b. *Represif Control*, pengawasan yang dilakukan saat kredit sudah diberikan kepada peminjam dana (Irham, 2014)

2.10. Teknik Pengawasan Kredit

Teknik pengawasan kredit menurut Muljono (2001:476) sebagai berikut :

- a. *Control By Exception*
- b. *Verband Control*
- c. Pengawasan fisik atau *On The Spot*
Pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank dengan mengadakan pemeriksaan langsung di tempat perusahaan/kegiatan usaha nasabah
- d. *Monitoring* Perkreditan
Monitoring dilakukan oleh perusahaan baik secara ekstern maupun intern.

2.11. Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah kredit yang pembayarannya tidak lancar yang dilakukan oleh peminjam dana kredit yang bersangkutan (Hasibuan, 2007:115).

2.12. Teknik Mengatasi Kredit Bermasalah

Kasmir, 2006:128 mengemukakan bahwa penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa teknik, antara lain:

- a. *Rescheduling*, tindakan penyelamatan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit/ jangka waktu angsuran.
- b. *Reconditioning*, teknik ini yaitu dengan mengubah persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga yaitu bunga dijadikan hutang pokok, penurunan suku bunga dan pembebasan bunga.
- c. *Restructuring*, perusahaan menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan danajdan usaha yang dibiayai memang masih layak.
- d. Kombinasi, merupakan gabungan dari jenis penyelamatan kredit yang diuraikan diatas.
- e. Penyitaan Jaminan, merupakan jalan terakhir yang dilakukan oleh perusahaan apabila nasabah tidak mampu lagi dalam mengembalikan semua hutangnya.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk membatasi studi dalam penelitian, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan pengawasan pemberian kredit modal kerja pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Capem Wates sebagai upaya untuk meminimalisir kredit bermasalah.
2. Mengevaluasi kredit bermasalah pada kredit modal kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Capem Wates.

3.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti diambil melalui data primer dan data sekunder karena peneliti melakukan pengambilan data secara langsung tanpa melalui perantara dan peneliti memperoleh data dari dokumen atau formulir.

3.4. Analisis Data

1. Evaluasi pelaksanaan pengawasan pemberian kredit modal kerja yang ditinjau dari prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Capem

Wates dimulai sejak pra realisasi kredit sampai dengan debitor melunasi kredit.

2. Evaluasi kredit bermasalah pada kredit modal kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Capem Wates pd 3(Tiga) periode 2013,2014 & 2015.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Penyajian Data

1. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja pada dasarnya telah memiliki banyak manfaat dan kelebihan diantaranya adalah jumlah pinjaman yang diberikan dapat disesuaikan dengan skala usaha dari calon debitor. Besar kecilnya jumlah kredit modal kerja yang akan disalurkan oleh perusahaan kepada calon debitor harus ditentukan sebelumnya, sehingga sesuai dengan jumlah kebutuhan debitor akan pemenuhan perkembangan dari sektor usahanya dimasa yang akan datang. Persyaratan pengajuan kredit modal kerja Bank Jatim Capem Wates :

- a. Surat keterangan permohonan pinjaman
- b. Fotocopy KTP
- c. Fotocopy kartu susunan keluarga
- d. Fotocopy surat nikah
- e. Pasfoto berwarna berukuran
- f. Fotocopy sertifikat yang dijamin
- g. Fotocopy SPPT pajak
- h. Fotocopy ijin usaha (NPWP,SIUP)
- i. Fotocopy buku tabungan bank jatim

2. Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja

Tahapan dan proses pemberian kredit modal kerja yang dilaksanakan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Capem Wates:

- a. Pengajuan Permohonan Kredit, menggunakan formulir berupa surat keterangan permohonan pinjaman disertai perlengkapan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan dalam pengajuan kredit. Pengajuan permohonan diberikan ke bagian administrasi untuk diperiksa kelengkapannya, apabila berkas sudah lengkap dapat dilanjutkan ketahap berikutnya. Namun, apabila belum lengkap dikembalikan kepada calon debitor untuk dilengkapi. Berkas yang sudah lengkap diberikan ke bagian umum untuk didisposisi ke penyelia operasional kredit untuk meminta persetujuan atas surat permohonan kredit yang disertai berkas persyaratan dan kemudian diserahkan ke bagian analisis kredit.

- b. Analisis Kredit, melakukan pengecekan BI *Checking* pada Sistem Informasi Debitor (SID) Bank Indonesia, bertujuan untuk mengetahui calon debitor memiliki pinjaman di bank lain atau tidak. Apabila calon debitor memiliki pinjaman maka permohonan kredit akan ditolak, namun jika tidak memiliki pinjaman akan dilanjutkan ke tahap *on the spot* ke tempat usaha debitor dan membuat laporan kunjungan nasabah pada lembar *Call Report Survey* sesuai keadaan nasabah. Kemudian analisis melakukan evaluasi dan analisis berdasarkan prinsip 5C dan hasilnya akan direkomendasikan kepada pimpinan cabang pembantu untuk mendapatkan persetujuan kelanjutan proses kredit.

- c. Putusan Kredit, apabila pimpinan cabang pembantu setuju dengan hasil rekomendasi maka akan membuat catatan kepada bagian administrasi kredit atas pembuatan formulir yang berupa putusan kredit (PTK) untuk putusan kredit yang diterima.

- d. Pemberian Kredit, bagian administrasi kredit menginput data nasabah yang disetujui pinjaman kreditnya oleh pihak bank, kemudian menerbitkan surat persetujuan pemberian kredit, surat advis, surat perjanjian kredit, kwitansi pencairan rangkap 3 dan tanda bukti agunan rangkap 2. Kemudian menghubungi nasabah untuk melakukan realisasi perjanjian kredit dan nasabah dengan membawa buku tabungan serta bukti kwitansi pencairan akan diarahkan menuju *teller* untuk melakukan pencairan dana.

3. Pengawasan Pemberian Kredit Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Capem Wates

- a. *Preventif Control*, pengawasan dilihat dari pengawasan fisik atau inspeksi *On The Spot*, pembinaan terhadap debitor guna meningkatkan usaha dari debitor maupun menyelesaikan permasalahan yang dihadapi debitor dan administrasi perkreditan. Salah satu obyek pengawasan kredit yaitu untuk mengumpulkan dan memeriksa berkas kelengkapan debitor yang dibutuhkan selama proses kegiatan kredit berlangsung.

- b. *Represif Control*, pengawasan pada saat kredit sudah diberikan kepada nasabah yaitu *monitoring* digunakan sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya penyimpangan dari syarat-syarat yang telah disepakati saat pengajuan kredit antara debitur dengan bank. Pengawasan ini juga bertujuan agar debitur disiplin dalam membayar angsuran pinjaman dengan tepat waktu sesuai dengan yang sudah disepakati.

4. Kolektibilitas Kredit

Disajikan data kredit modal kerja Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Capem Wates, kredit yang disalurkan ini telah dikelompokkan berdasarkan kolektibilitas yang ditetapkan perusahaan yaitu lancar (kolektibilitas 1), dalam perhatian khusus (kolektibilitas 2), kurang lancar (kolektibilitas 3), diragukan (kolektibilitas 4), dan macet (kolektibilitas 5). Kredit bermasalah Bank Jatim Capem Wates adalah kredit yang tergolong kolektibilitas 3, 4 dan 5.

Tabel 2 Kolektibilitas Kredit Modal Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Capem Wates

Keterangan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Lancar	54.044.954.431,41	74.102.904.437,63	79.799.837.065,48
DPK	350.828.888,38	413.993.487,55	285.820.156,14
Kurang Lcr	-	-	367.692.894,06
Diragukan	-	24.169.654,53	-
Macet	486.145.273,12	232.839.983,85	440.994.023,10
TOTAL	54.881.928.592,91	74.773.907.563,53	80.894.344.138,78

Sumber: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Capem Wates.

Tabel 3 Data Kredit Bermasalah pada Kredit Modal Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Capem Wates

Keterangan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Kurang Lancar	-	-	367.692.894,06
Diragukan	-	24.169.654,53	-
Macet	486.145.273,12	232.839.983,85	440.994.023,10
TOTAL	486.145.273,12	257.009.638,38	808.686.917,16

Sumber: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Capem Wates.

4.2. Analisis dan Interpretasi Data

1. Analisis Pemberian Kredit Modal Kerja

Pelaksanaan prosedur pemberian kredit modal kerja Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Capem Wates terdapat perbedaan

dengan ketentuan dari bank dan teori yang dikemukakan oleh Kasmir 2014, Namun dalam praktiknya yang dilakukan sebagai berikut yaitu:

a. Pengajuan Permohonan Kredit

Proses awal pengajuan kredit berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan bank sudah sesuai dengan pelaksanaannya yaitu hanya menggunakan formulir berupa (SKPP) Surat Keterangan Permohonan Kredit disertai berkas perlengkapan yang telah dipersyaratkan dalam pengajuan kredit. Apabila berkas persyaratan sudah lengkap sesuai dengan ketentuan maka akan di proses ketahap berikutnya. Namun, teori Kasmir yang digunakan sebagai acuan tahap awal pengajuan kredit calon debitur membuat proposal yang terkait dengan latar belakang perusahaan sampai dengan keterangan tentang berapa jumlah pinjaman. Prosedur permohonan kredit berjalan sudah cukup baik.

b. Analisis Kredit

Tahapan analisis kredit Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Capem Wates melakukan wawancara kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan dan biasanya wawancara juga dilakukan sekali apabila terdapat kurangnya informasi pihak bank menghubungi melalui *telephone*. Bagian analisis kredit melakukan pemeriksaan kembali mengenai kelengkapan persyaratan kredit serta melakukan *BI Checking* yaitu laporan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berisi riwayat kredit/pinjaman nasabah kepada bank lain dalam data Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia, setelah itu apabila nasabah tidak memiliki pinjaman di bank lain dilanjutkan tahap berikutnya kunjungan ke tempat usaha debitur (*On The Spot*) serta menilai jaminan nasabah. Setelah melakukan kunjungan langsung bagian analisis kredit membuat laporan kunjungan nasabah pd lembar *Call Report Survey* sesuai dengan keadaan nasabah yang sebenarnya. Penilaian evaluasi kelayakan debitur dilakukan berdasarkan prinsip 5C yaitu, *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*. Penerapan pemberian kredit yang dilakukan oleh bagian analisis kredit sudah berjalan cukup baik, namun apabila penilaian agunan dilakukan oleh seorang supervision yang berkaitan dengan masalah kredit apakah kredit tersebut kedepannya dapat menguntungkan atau tidak.

c. Putusan Kredit

Tahapan putusan kredit pada saat pimpinan cabang pembantu telah menyetujui rekomendasi, dan pimpinan cabang akan membuat catatan kepada bagian administrasi kredit atas pembuatan formulir yang berupa putusan kredit (PTK) untuk putusan yang diterima, sedangkan apabila permohonan kredit ditolak maka seluruh berkas akan dikembalikan ke penyelia kredit untuk tanda persetujuan kredit dan kemudian diserahkan ke bagian analisis kredit. Analisis kredit yang nantinya akan menyerahkan ke bagian administrasi kredit untuk membuat surat penolakan dengan disertai alasan penolakan. Hal tersebut telah dilaksanakan dengan prosedur yang sesuai dengan penanggung jawab yang baik.

d. Penyaluran Kredit

Bagian analisis kredit melakukan aplikasi untuk data persetujuan kredit (menginput data) nasabah yang disetujui pinjaman kreditnya oleh pihak bank, kemudian menerbitkan surat persetujuan pemberian kredit (SPPK), surat advis, surat pengakuan hutang (SPH), Surat Perjanjian Kredit, Kwitansi pencairan dan tanda terima bukti agunan. Bagian analisis kredit menghubungi nasabah untuk melakukan realisasi kredit dengan memberitahukan bahwa debitor diharuskan untuk membawa buku tabungan bank Jatim a.n debitor. Realisasi dilakukan antara nasabah dan notaris, maka nasabah akan diarahkan ke teller untuk melakukan pencairan dana. Realisasi kredit yang dilakukan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan proses dan prosedur yang telah ditentukan.

2. Analisis Pelaksanaan Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Capem Wates yang menjadi obyek penelitian merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank kepada debitor yang dilakukan pada saat proses permohonan kredit atau pra-realisis sampai pasca realisasi kredit atau sampai debitor melunasi kreditnya. Fungsi pengawasan dalam bidang perkreditan sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya risiko kerugian dalam penyaluran fasilitas kredit.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Bank Jatim telah sesuai dengan pedoman ketentuan bank dan juga teori yang

dikemukakan oleh (irham, 2014) yaitu terdiri dua jenis pengawasan, *Preventif Control* dan *Represif Control*. *Preventif Control* yang dilakukan sebelum kredit disalurkan kepada calon debitor seperti pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan berkas hingga survei langsung ke lapangan, namun pada pengawasan *Represif Control* terdapat sedikit perbedaan antara ketentuan bank, teori dan juga pelaksanaan praktik yang dilakukan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Capem Wates.

Perbedaan pada pengawasan *Represif Control* berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank yang dijadikan sumber data terletak pada kunjungan yang dilakukan petugas bank ke lokasi debitor (*On The Spot*). Pada teori kunjungan dilakukan sekali dalam tiga bulan, sedangkan ketentuan bank kunjungan dilakukan minimal sekali dalam dua bulan. Namun, dalam praktiknya kunjungan yang dilakukan belum maksimal sesuai dengan ketentuan melainkan dilakukan 1-2 kali setelah pencairan kredit dan bisa juga dilakukan secara mendadak, dan akan dilakukan kunjungan lagi jika debitor terlihat mulai mengalami tanda-tanda akan terjadinya kredit bermasalah. Seharusnya apabila bank melakukan kunjungan lebih dari satu atau dua kali akan lebih baik untuk mengetahui perkembangan usaha debitor sehingga dapat meminimalkan terjadinya kredit bermasalah.

3. Analisis Non Performing Loan (NPL)

Data mengenai kredit modal kerja yang disalurkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Capem Wates pada tabel 2 menunjukkan bahwa total kredit yang disalurkan setiap tahunnya semakin meningkat. Pada tahun 2013 kredit modal kerja sebesar Rp 54.881.928.592,91 kemudian tahun 2014 kredit yang disalurkan terjadi peningkatan Rp 74.773.907.563,56 dan pada tahun 2015 penyaluran kredit meningkat lagi Rp 80.894.344.138,78. Meskipun sebagian besar kredit modal kerja yang disalurkan termasuk dalam kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus, namun kolektibilitas tersebut jumlahnya dapat menurun apabila tidak dilakukan pengawasan secara terus menerus.

Pada tabel 3 menunjukkan bahwa total kredit bermasalah pada kredit modal kerja mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kredit bermasalah pada tahun 2013 sebesar

Rp486.145.273,12 kemudian untuk tahun 2014 kredit bermasalah menurun menjadi Rp257.009.638,38 dan pada tahun 2015 kredit bermasalah mengalami peningkatan lagi yaitu menjadi Rp 808.686.917,16. Pada tahun 2013 dan 2014 tidak ada nasabah yang termasuk dalam kolektibilitas kredit kurang lancar, tetapi pada tahun 2015 terdapat kredit bermasalah dalam kolektibilitas kredit kurang lancar sebesar Rp 367.692.894,06 dan tahun 2013 dan 2015 untuk kolektibilitas kredit diragukan juga tidak ada, sedangkan kredit bermasalah yang tergolong dalam kolektibilitas diragukan tahun 2014 Rp 24.169.654,53. Kredit bermasalah yang tergolong dalam kolektibilitas macet selalu lebih banyak dibandingkan kredit kurang lancar dan diragukan.

Berdasarkan tabel 2 dan 3 dapat diketahui besarnya prosentase kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) kredit modal kerja dengan rumus.

$$\text{NPL} : \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

- a.
$$\text{NPL tahun 2013} = \frac{486.145.273,12}{54.881.928.592,91} \times 100$$

= 0,89%
- b.
$$\text{NPL tahun 2014} = \frac{257.009.638,38}{74.773.907.563,56} \times 100$$

= 0,34%
- c.
$$\text{NPL tahun 2015} = \frac{808.686.917,16}{80.894.344.138,78} \times 100$$

= 0,99%

Sehingga dapat diketahui dari hasil analisis data yang disajikan yaitu kredit yang disalurkan dan kredit bermasalah pada Bank Jatim Capem Wates kenaikan total kredit yang disalurkan tidak diikuti pula dengan kredit bermasalah. Kredit bermasalah pada tahun 2014 sempat mengalami penurunan yaitu menjadi 0,34%, tetapi pada tahun 2015 mengalami kenaikan lagi. Batas maksimal NPL yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Namun Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur memiliki target NPL dari kantor pusat dimana setiap kantor cabang memiliki target yang berbeda-beda untuk setiap tahunnya. Bank Jatim Wates ditetapkan target NPL sebesar 0,65% jadi untuk kredit bermasalah masih dalam batasan wajar.

Apabila prosentase kredit bermasalah suatu bank lebih besar dibandingkan NPL yang ditetapkan Bank Indonesia, maka hal tersebut akan mengakibatkan tersendatnya penyaluran kredit dan dapat mengurangi penilaian terhadap tingkat kesehatan bank tersebut. Karena secara umum besarnya NPL bank Jatim masih dibawah target yang ditentukan dan masih dalam batas kewajaran maka dapat dikatakan baik. Meskipun demikian, masih perlu melakukan berbagai upaya lagi untuk meminimalkan NPL sekecil mungkin, karena semakin rendah NPL maka akan semakin baik tingkat penilaian kesehatan.

Besarnya NPL pada Bank Jatim selalu berfluktuasi. Terjadinya kenaikan besarnya kredit bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Faktor Intern, dapat menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah yaitu kurangnya kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit dalam hal analisis, administrasi maupun pengawasan fisik dan agunan. Pihak bank perlu meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan kredit dan pengendalian intern yang salah satunya lebih memperketat pengawasan kredit yang ada.
- b. Faktor Ekstern, yaitu yang berhubungan dengan kemampuan nasabah dalam melunasi kredit, hal ini disebabkan karena kegagalan bisnis atau menurunnya usaha debitor dan penyalahgunaan dana kredit. Pemakaian kredit yang menyimpang akan menyebabkan nasabah tidak dapat mengembalikan kreditnya sebagaimana mestinya dan dengan menurunnya usaha debitor tentunya akan menurunkan pendapatan perusahaan dalam melunasi angsuran pinjaman kepada bank. Terdapat juga unsur ketidak sengaja yang dilakukan nasabah seperti bencana alam. Sehingga, dapat mengganggu produktivitas usaha debitor dan berakibat memburuknya keuangan debitor.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah tersebut, maka salah satu hal yang harus diperhatikan oleh bank adalah pelaksanaan fungsi pengawasan kredit. Bank Jatim Wates perlu meningkatkan intensitas pengawasan kredit agar segera teridentifikasi apabila terjadi penyimpangan oleh debitor atau sudah mulai terlihat adanya gejala akan terjadinya kredit bermasalah.

Selain itu juga perlu dilakukan tindakan lebih tegas kepada debitor yang telah melakukan penyimpangan, seperti berupa peringatan atau teguran dan penagihan.

Seperti yang telah dijelaskan pada analisis pengawasan kredit, maka pelaksanaan pengawasan kredit dinilai cukup efektif sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir kredit bermasalah. Dengan berbagai upaya yang dilakukan tersebut diharapkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Capem Wates dapat menurunkan rasio *Non Performing Loan* (NPL) menjadi lebih kecil dan mendekati 0%.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan pengawasan pemberian kredit modal kerja yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Capem Wates menggunakan pengawasan secara *Preventif Control* dan *Represif Control* sesuai dengan ketentuan bank dan teori yang digunakan oleh peneliti yaitu yang dikemukakan oleh Kasmir, namun dalam pelaksanaan kunjungan ke tempat debitor tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan bank dan juga teori melainkan dilakukan secara mendadak dan belum maksimal sesuai dengan ketentuan.
- b. Pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang disebut dengan kredit bermasalah dan termasuk dalam perhitungan *Non Performing Loan* (NPL) yaitu kredit kurang lancar, diragukan dan macet. Rasio NPL untuk tahun 2013 0,89%, tahun 2014 0,34% dan untuk tahun 2015 0,99%. Kredit bermasalah yang terjadi pada bank jatim capem wates melebihi target dari kantor pusat namun untuk target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia masih dalam batas kewajaran karena masih jauh dari yang ditetapkan yaitu 5%.

5.2. Saran

- a. Pelaksanaan pengawasan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Capem Wates dengan menggunakan pengawasan secara *Preventif Control* dan *Represif Control* sudah cukup baik, namun masih ada yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi yaitu pengawasan ke tempat debitor sebaiknya dilakukan secara rutin sesuai dengan ketentuan bank agar

pihak bank dapat mengetahui perkembangan usaha debitor dan apabila debitor terlihat mengalami masalah pihak bank dapat segera membantu memberikan jalan keluarnya agar debitor tidak mengalami permasalahan yang lebih besar yang dapat mengakibatkan bertambahnya kredit bermasalah.

- b. Berdasarkan kesimpulan mengenai kredit bermasalah yang terjadi pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Capem Wates masih dalam batas kewajaran alangkah baiknya apabila pihak bank lebih meningkatkan lagi dalam memberikan pengawasan sehingga dapat meminimalkan prosentase *Non Performing Loan* hingga mendekati atau mencapai 0% karena semakin kecil prosentase NPL, maka semakin baik tingkat penilaian kesehatan bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Faisal. 2005. *Manajemen Perbankan, Cetakan Ketiga*, UUM Press, Malang.
- Budisantoso, Totok dan Nuritomo. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Firdaus, Rachmat & Ariyanti. 2011. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Cetakan Kelima*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Irham, Fahmi. 2014. *Manajemen Perkreditan*. Bandung: Alfabeta.
- Kasmir 2014. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muljono, Teguh Pudjo. 2001. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*. Yogyakarta: BPF
- Peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan